

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 2005.
- Aburera, Sukarno, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Adami, Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Alkostar, Artidjo, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perpestitif Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- A. R., Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Katalogis, Surabaya, 2015.
- Arsyad, Loncolin, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- , *Pengembalian Aset Korupsi Masukan Konvensi International Anti Korupsi*, Seputar Indonesia, Bandung, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)*, Selatpanjang: Kencana Grafika, 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2018.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- D., Ravana dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

- Danil, Elwi, *Korupsi: konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Darmawati, *Pengembalian Aset Kerugian Negara Perkara Korupsi Dalam Pemikiran Ius Constituendum*, Jurnal Restorative Justice, Jakarta, 2017.
- Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- H., Ardhan Eko *Komplikasi Hukum Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2017.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hamzah, Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hermien, Nugraheni, dkk, *Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- HS., Salim dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ketiga, Jakarta Raja Grafindo Indonesia, 2014.
- Huda, Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Iskandar, Supadmo Ika, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Airlangga, Surabaya, 2008.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Tindak pidana korupsi. Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2016.
- Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- L., Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pemecahan*, Bagian Pertama, Djembatan, Jakarta, 2001.
- , *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Lasmadi, Sahuri, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- M., Gaffar, Janedjri, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Surakarta, 2009.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet.I, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, 2010.
- M. D., Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Moeljatno, *Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Moonti, Roy Marthen, *Problematika Peningkatan Perangkat Desa dan Pengolahan Dana Desa*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nashriana, *Aset recovery dalam Tindak Pidana Korupsi, Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Osnawati, *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan*

- Kesejahteraan Masyarakat*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan, Lampung, 2015.
- P., Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015.
- P. M., Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Pramono, Widyono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Litbang Kompas, Jakarta, 2017.
- Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke I, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Prasetyo, A., *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rafika Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Prodjohamidjoyo, M., *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1973.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Rasid, Ariman, *Raghib Fahmi, Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- R.M., Suharto, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- S., Zulkarnain, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Saibani, A., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.

- Saleh, Roeslan, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 2010.
- Senoadji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Sinlaeloe, Paul, *Korupsi dan Pemberantasannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sofian, Ahmad, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prena Media, 2018.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
- , *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gaya Media, Grafindo, Yogyakarta, 2014.
- Suryadi, Bambang, *Memahami Permendesa Tentang Desa*, Sai Wawai: Gunung Sugih, 2016.
- T., Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, berikut studi kasus, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Yunto, Emerson, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta, 2014.

B. Jurnal/Artikel

- Budimansyah, *Rekonstruksi dari Penegakan Hukum Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 112.14, Jakarta, 2019.
- Destifani, *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6, Hlm. 12.

Firmansyah, Teguh, *Korupsi Dana Desa, Kades Kalpare Ditetapkan Jadi Tersangka*, <https://www.republika.co.id/berita/rd24dz377/korupsi-dana-desa-kades-kalpare-ditetapkan-jadi-tersangka>, di akses pada tanggal 9 September 2022.

Katadata, *Beda Kerugian Negara E-KTP*, <https://katadata.co.id/berita/2017/03/13/kerugian-negara-e-ktp-versi-bpkp-ketua-bpk-itu-terserahpengadilan>, diakses pada 5 Desember 2023.

Prabawa, Akbar, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3 No. 228 Desember 2015.

Prasetyo, Eko, *Wacana hentikan kasus korupsi di bawah Rp 100 juta jika uang dikembalikan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang-dikembalikan.html>, di akses pada tanggal 9 September 2022.

S., Hersriavita, *Upaya Pengembalian Kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7(1), 15–28, Semarang, 2019.

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No. 3, Jakarta, 2019.

Siregar, Syahban, Hotma P Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima, *Kedudukan Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pascasarjana Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2021.

Surabaya Pagi, *Audit BPK dan BPKB Berbeda, edisi Sabtu, 05 Februari 2017*, [http://www.surabayapagi.com/read/60292/2011/02/05/Audit BPKP dan BPK, Berbeda.html](http://www.surabayapagi.com/read/60292/2011/02/05/Audit_BPKP_dan_BPK_Berbeda.html), diakses pada 5 Desember 2023.

Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

